PEMKAB
TAPANULI TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2025

















KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP KabupatenTapanuli Tengah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati kepada publik dalam mencapai tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance* yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga dalam penyusunan berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akhirya kami berharap semoga dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pandan, 31 Maret 2026

BUPATI TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *good governance,* Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen Pemerintahan. Akuntabilitas harus memuat Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolakukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis Organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai penyelenggaran Pemerintahan telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggunjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah ini disusun sesuai Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan Tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025–2029 berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenTapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2025–2029 yang menggambarkan Tujuan, sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan dan kegagalan selama Tahun 2025 perlu di Evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi ini berguna untuk Menyusun perencanaan tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025–2029.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 3
1.3 Gambaran Umum KabupatenTapanuli Tengah 3
1.4 Dasar Hukum 13
1.5 Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 31
1.6 Ruang Lingkup 36

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja 21
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator 42
2.3 Indikator Kinerja Utama 46
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun. 47

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 54
3.2 Analisa Capaian Kinerja..... 59
3.4 Realisasi Anggaran 92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B.Rencana Tindak Lanjut 95

LAMPIRAN

- Reviu Inspektorat KabupatenTapanuli Tengah

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.3.1 Luas Wilayah KabupatenTapanuli Tengah 5
Tabel 1.3.2 JumlahASN Berdasarkan Jenjang Pendidkan 7
Tabel 1.3.3 Jabatan ASN KabupatenTapanuli Tengah 12
Tabel 1.3.4 ASN yang mengikuti Pendidkan dan Pelatihan 12
Tabel 1.3.5 Manajemen Pengelolaan ASN 13
Tabel 2.2.1 Keterkaitan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Kinerja 43
Tabel 2.3.1 Indikator Kinerja Utama 47
Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 31
Tabel 3.1.1 Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja 53
Tabel 3.2.1 Interprestasi atas pencapaian sasaran 53
Tabel 3.2.2 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025..... 55
Tabel 3.3.1 Analisis Capaian Sasaran 1..... 61
Tabel 3.3.2 Analisis Capaian Sasaran 2..... 62
Tabel 3.3.3 Analisis Capaian Sasaran 3..... 62
Tabel 3.3.4 Analisis Capaian Sasaran 4..... 63
Tabel 3.3.5 Analisis Capaian Sasaran 5..... 64
Tabel 3.3.6 Analisis Capaian Sasaran 6..... 65
Tabel 3.3.7 Analisis Capaian Sasaran 7..... 66
Tabel 3.3.8 Analisis Capaian Sasaran 8..... 67
Tabel 3.3.9 Analisis Capaian Sasaran 9..... 68
Tabel 3.3.10 Analisis Capaian Sasaran 10..... 68
Tabel 3.3.11 Analisis Capaian Sasaran 11..... 69
Tabel 3.3.12 Analisis Capaian Sasaran 12..... 70
Tabel 3.3.13 Analisis Capaian Sasaran 13..... 70
Tabel 3.3.14 Analisis Capaian Sasaran 14..... 71
Tabel 3.3.15 Analisis Capaian Sasaran 15..... 72
Tabel 3.3.16 Analisis Capaian Sasaran 16..... 72
Tabel 3.3.17 Analisis Capaian Sasaran 17..... 73
Tabel 3.3.18 Analisis Capaian Sasaran 18..... 73
Tabel 3.3.19 Analisis Capaian Sasaran 19..... 73
Tabel 3.3.20 Analisis Capaian Sasaran 20..... 74

Tabel 3.3.21 Analisis Capaian Sasaran 21..... 75
Tabel 3.3.22 Analisis Capaian Sasaran 22..... 77
Tabel 3.3.23 Analisis Capaian Sasaran 23..... 78
Tabel 3.3.24 Analisis Capaian Sasaran 24..... 78
Tabel 3.3.25 Analisis Capaian Sasaran 25..... 80
Tabel 3.3.26 Analisis Capaian Sasaran 26..... 81
Tabel 3.3.27 Analisis Capaian Sasaran 27..... 81
Tabel 3.3.28 Analisis Capaian Sasaran 28..... 82
Tabel 3.3.29 Analisis Capaian Sasaran 39..... 82
Tabel 3.3.30 Analisis Capaian Sasaran 30..... 83
Tabel 3.3.31 Analisis Capaian Sasaran 31..... 84
Tabel 3.3.32 Analisis Capaian Sasaran 32..... 85
Tabel 3.3.33 Analisis Capaian Sasaran 33..... 86
Tabel 3.3.34 Analisis Capaian Sasaran 34..... 87
Tabel 3.3.35 Analisis Capaian Sasaran 35..... 88
Tabel 3.3.36 Analisis Capaian Sasaran 36..... 89
Tabel 3.3.37 Analisis Capaian Sasaran 37..... 90
Tabel 3.3.38 Analisis Capaian Sasaran 38..... 90
Tabel 3.3.39 Analisis Capaian Sasaran 39..... 91
Tabel 3.3.40 Analisis Capaian Sasaran 40..... 91
Tabel 3.4.1. Realisasi Anggaran 92

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sudah cukup lama. Penyelenggaraan otonomi daerah ini bukan tanpa tujuan. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah ini, diharapkan terjadinya peningkatan atas kesejahteraan umum, pelayanan umum, serta kapasitas antar daerah. Maka tuntutan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah meningkat. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan kedepan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan public sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodic setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KabupatenTapanuli Tengah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instasi pemerintah yang disampaikan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah.

Akuntabilitas adalah bentuk pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahdaerah salah satunya dengan membuat laporan kinerja yang dihasilkan dari sebuah system manajemen kinerja berupa system akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Output yang dihasilkan dari SAKIP ini berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada tahun 2017 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan, ada empat hal utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja kabupaten/kota, yaitu tujuan atau sasaran belum beriorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan belum dibuat secara jelas dan terukur, ketidak sesuaian program atau kegiatan yang direncanakan dengan sasaran, dan ketidaksesuaian rincian kegiatan dengan tujuan kegiatan.

Keempat masalah tersebut dapat timbul karena adanya ketidakpahaman sumber daya manusia pada instansi dalam perumusan akuntabilitas kinerja.

Sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, cenderung memiliki pemahaman yang baik pula, karena pemahaman adalah salah satu karakteristik dari kompetensi. Fungsi organisasi harus diisi oleh sumber daya manusia dengan kompetensi yang tepat agar pekerjaannya dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dimaksud untuk menyampaikan capaian kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam satu Tahun Anggaran, dikaitkan dengan proses pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga sebagai bahan evaluasi Akuntabilias Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar dapat melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparandan dapat ditertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Membuat Kabupaten Tapanuli Tengah yang akuntabel, sehingga dapat berperan efisien, efektif dan respons;
3. Menerima masukan sebagai umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan sebagai peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

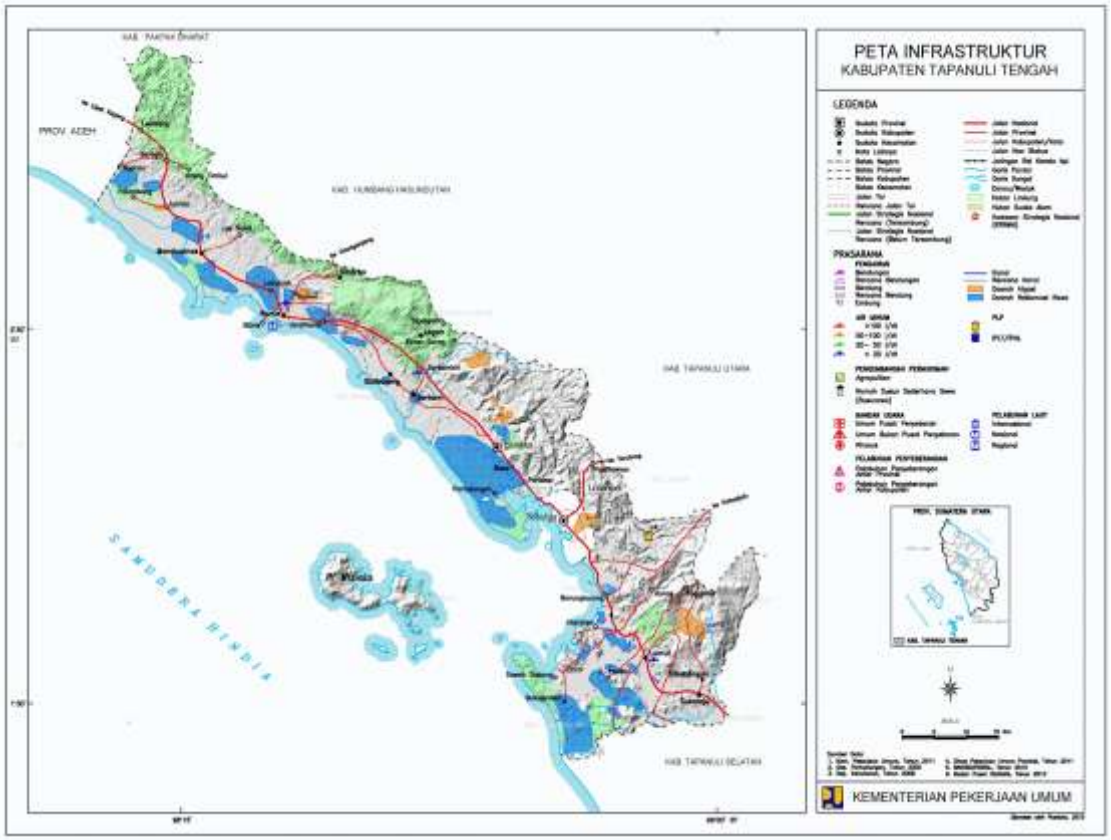
1.3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

a. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m di atas permukaan laut dan terletak pada 1º11'00"-2º22'00" Lintang Utara (LU) dan 98º07'-98º12' Bujur Timur (BT), dengan batas-batas wilayah

pada sebelah utara berbatas dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Pakpak Bharat di sebelah barat berbatasan dengan Sibolga dan Samudera Indonesia.

1.3. Gambar Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah



KabupatenTapanuli Tengah mempunyai luas daratan sebesar 2.194,98 3,06 persen dan luas laut Kabupaten Tapanuli Tengah ± 4.000 Km^2, Sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan Sebagian kecil merupakan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Hindia, Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah ± 6.194,98 Km^2. Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 Kecamatan, yang terdiridari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yakni 400,65 Km^2 (18,25 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 Km^2 (0,99 persen). Secara rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel.

Tabel 1.3.1

Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km^2)	%
1.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
2.	Badiri	2	7	129,49	5,90
3.	Sibabangun	1	6	284,64	12,97
4.	Lumut	1	5	105,98	4,83
5.	Sukabangun	-	6	49,37	2,25
6.	Pandan	20	2	34,30	1,56
7.	Tukka	5	4	150,93	6,88
8.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
9.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
10.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
11.	Kolang	2	12	436,12	19,88
12.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
13.	Sorkam Barat	2	9	44,58	2,03
14.	PasaribuTobing	-	9	103,36	4,71
15.	Barus	2	11	21,81	0,99
16.	Sosorgadong	1	8	143,13	6,52
17.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
18.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
19.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
20.	Sirandorung	1	7	87,72	4,00
Tapanuli Tengah		56	159	2.194,97	100,00

b. Topografi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada di pesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m diatas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di

sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m di atas permukaan laut dan kearah tengah merupakan Kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 diatas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan PasaribuTobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatas langsug dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai ± 200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan.Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian diatas 100 m diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8 %), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (> 40 %).

c. Geologi

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kondisi geologis yang cukup unik dan kompleks, mencerminkan beragam formasi geologis yang ada di wilayah ini. Selain struktur tanah alluvium dan regosol, daerah ini juga dikenal memiliki formasi vulkanik yang signifikan, terutama di bagian pegunungan. Aktivitas vulkanik dimasa lalu telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan tanah regosol, yang kaya akan mineral vulkanik dan sering ditemukan di daerah kaki bukit.

Sebagian besar wilayah pesisir di Tapanuli Tengah memiliki tanah alluvium yang subur, hasil dari sedimentasi yang terus menerus dari sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia. Tanah alluvium ini sangat cocok untuk pertanian, terutama untuk tanaman padi dan palawija, serta mendukung ekosistem mangrove yang penting bagi keseimbangan lingkungan pesisir.

Dalam hal sumber daya tambang, selain bahan galian bukan logam dan batuan, Tapanuli Tengah juga memiliki potensi geothermal yang cukup besar. Potensi energi panas bumi ini menjadi salah satu perhatian utama untuk pengembangan energi terbarukan di masa depan. Selain itu, beberapa daerah di Tapanuli Tengah juga memiliki endapan batubara, meskipun belum dieksplorasi secara signifikan. Keberadaan berbagai jenis mineral dan sumber daya alam ini menjadikan Tapanuli Tengah sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor pertambangan dan energi.

d. Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batang Toru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

e. Klimatologi

Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklimtropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, suhu udara maksimum bisa mencapai 36,20 ^{o}C dan suhu minimum mencapai 22,00^{o}C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 26,4022^{o}C. Adapun rata-rata curah hujan 358,71 mm. Kecepatan angin rata-rata 2,68 m/det, rata-rata penyinaran matahari 56,17% dan rata-rata penguapan 3,80 mm.

f. Penggunaan Lahan

Guna lahan di Kabupaten Tapanuli Tengah diklasifikasikan menjadi delapan kategori. Sedangkan guna lahan yang terluas adalah peruntukan lahan hutan/perkebunan yang mencapai 167.951,38 Ha atau 77,32% dari total luas Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut merupakan peta tata guna lahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Guna lahan untuk perkebunan seluas 43.501,80 Ha dari total luas Kabupaten Tapanuli Tengah. Perkebunan yang mendominasi adalah perkebunan karet dengan total luas areal sekitar 31.846,5 Ha atau 73,21 persen, kemudian adalah perkebunan kelapa dengan luas sekitar 5.428 Ha, selanjutnya adalah perkebunan sawit dengan luas sekitar 2.753 Ha dan perkebunan kakao dengan luas sekitar 2.695,5 Ha dari total luas perkebunan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Guna lahan peruntukan hutan seluas 161.948,46 ha atau sekitar 7,38 persen dari Total luas Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana sebagai Kawasan hutan lindung luasannya sekitar 54.975,11 Ha atau 33,95 persen dari luas Kawasan hutan, yang diperuntukkan sebagai Kawasan hutan produksi sekitar 7.666,41 Ha, yang ditetapkan sebagai kawasan HPT sekitar 51.896,19 Ha dan areal penggunaan lain sekitar 47.410,75 Ha dari total luas Kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

g. Gambaran Umum Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengacu pada Undang UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenTapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan diatur dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan serta Unit Pelaksana Teknis daerah, dengan struktur sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Sekretaris Daerah;

3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Inspektorat Daerah;
5. Asisten yang terdiri dari :
    a. Asisten Pemerintahan Umum membidangi:
        - Bagian Pemerintahan Umum;
        - Bagian Hukum dan Orta;
    b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi :
        - Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
        - Bagian Umum;
        - Bagian Pengadan Barang/Jasa;
        - Bagian Protokol;
    c. Asisten Administrasi Umum membidangi:
        - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
        - Bagian Umum;
        - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Staf Ahli yang terdiridari :
    - BidangPemerintahan, Hukum dan Politik;
    - BidangKemasyarakatan, Perekonomian dan Pembangunan;
    - BidangAdministrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
7. Dinas Daerah yang terdiridari :
    - Dinas Pendidikan;
    - Dinas Kesehatan;
    - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    - Satuan Polisi Pamong Paraja;
    - Dinas Sosial;
    - Dinas Ketenagakerjaan;
    - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - Dinas Ketahanan Pangan;
    - Dinas Lingkungan Hidup;
    - Dinas Kependudukan dan PencacatanSipil;
    - Dinas Pemberayaan Masyarakat Desa;
    - Dinas PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana;

- Dinas Perhubungan;
- Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Koperasi, Usaka Kecil dan Menengah;
- Dinas Penanaman Modal dan PelayananPerizinanTerpadu Satu Pintu;
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Pertanian;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

8. Badan Daerah yaitu terdiri dari :
   - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   - Badan PengelolaKeuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
   - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Lembaga Lain Daerah yaitu terdiri dari ;
   - Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
10. Kecamatan yaitu terdiri dari :
    - Kecamatan Pandan;
    - Kecamatan Saruik;
    - Kecamatan Tukka;
    - Kecamatan Badiri;
    - Kecamatan Pinangsori;
    - Kecamatan Lumut;
    - Kecamatan Sibabangun;
    - Kecamatan Sukabangun;
    - Kecamatan Tapian Nauli;
    - Kecamatan Sitahuis;
    - Kecamatan Sorkam;
    - Kecamatan Sorkam Barat;
    - Kecamatan Kolang;

- Kecamatan Pasaribu Tobing;
- Kecamatan Barus;
- Kecamatan Sosorgadong;
- Kecamatan Barus Utara;
- Kecamatan Andam Dewi;
- Kecamatan Sirandorung;
- Kecamatan Manduamas;

11. 159 Desa dan 56 Kelurahan;

- Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan jumlah ASN pada tahun 2023 sebanyak 4.490 orang, dan pada tahun 2024 menjadi sebanyak 4.253 orang (turun 237 ASN atau sebesar 9,47%).Penurunan jumlah ASN ini karena banyak yang memasuki purna tugas, sementara penambahan ASN sangat terbatas. Gambaran singkat profil jumlah ASN berdasarkan jenjang Pendidikan tahun 2024-2025 disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.2
Jumlah ASN berdasarkan jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	2024	2025
1	2	3	4
1.	SD	14	37
2.	SMP	22	41
3.	SMA	519	1389
4.	D1 - D3	836	1315
5.	D4 - S1	2.589	5184
6	S2	272	307
7	S3	2	2
	Jumlah	4.254	8.275

Sumber BKPSDM

Berdasarkan Tabel sebagaimana tersebut di atas, apabila dilihat dari peta penyebaran jumlah jabatan ASN Tahun 2025 disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.3

Jabatan ASN Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah	Orang	25	22
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	Orang	474	440
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	Orang	2.827	5836
4.	Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	Orang	937	2477

Sumber: BKPSDM

Berdasarkan Tabel sebagaimana tersebut di atas, dari tahun ketahun jumlah jabatan baik pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan pemangku jabatan fungsional tertentu cenderung mengalami penurunan, ha lini disebabkan karena adanya pengalihan jabatan structural kejabatan fungsional tertentu diantaranya jabatan struktural eselon III (Jabatan Administrator) dan eselon IV (Jabatan Pengawas) keJabatan Fungsional.

Berikut ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025 disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.4

ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	84,57	90,56
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	10,49	14,13

Sumber BKPSDM

Berdasarkan Tabel sebagaimana tersebut di atas, kondisi jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, maupun Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural setiap tahunnya cenderung menurun, hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat. Sedangkan manajemen pengelolaan

ASN Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.3.5
Manajemen Pengelolaan ASN

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2024	2025
1.	Indeks Profesonalitas ASN	Indeks	75,73	63,62
2.	Indeks Sistem Merit	Indeks	-	-
3.	Persentase ASN yang mengkuti Diklat	%	84,57	90,56

Sumber BKPSDM

1.4. Dasar Hukum

Penysunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2026 Nomor 1);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 Nomor 2);

1.5. Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun, sebaliknya, jika isu-isu strategis diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka Panjang menjadi Langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi.

Dengan demikian, dapat dipahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistic untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

A. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah Ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia

   Hilirisasi industry mengacu pada proses meningkatkan nilai tambah dalam suatu sector industry melalui peningkatan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Ini melibatkan transformasi produk mentah atau setengah jadi menjadi produk jadi dengan menggunakan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang lebihtinggi. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) mencatat bahwa realisasi investasi dalam bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai Rp 375,4 triliun, yang merupakan 26,5% dari total investasi pada periode tersebut. Investasi terbesar terjadi pada sektor smelter mineral, terutama nikel, dengan realisasi mencapai Rp 216,8 triliun.Selain itu, sector minyak dan gas, kehutanan, pertanian, dan ekosistem kendaraan listrik juga menerima investasi signifikan dalam proses hilirisasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus perdagangan pada November 2023 mencapai USD2,41 miliar, dengan surplus akumulatif periode Januari-November 2023 mencapai USD33,63 miliar. Hilirisasi menjadi kunci dalam mempercepat sector industri dan ekspor khususnya di KabupatenTapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah dapat fokus pada peningkatan nila

itambah pada komoditas sumber daya alam. Pemerintah telah menyediakan infrastruktur, insentif fiskal, dan lingkungan bisnis yang kondusif untuk mendukung perkembangan industrihilir. Investasi dalam smelter mineral telah terbukti mendorong ekspor dan meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan.

2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

   Sinkronisasi antara kebijakan makro dan sectoral menjadi landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Koordinasi yang efektif antara kebijakan makro dengan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor spesifik akan memastikan konsistensi tujuan pembangunan nasional. mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan manfaat ekonomi. Dengan demikian, integrasi yang kokoh antara kedua jenis kebijakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, tetapi juga mengoptimalkan potensi pertumbuhan dalam berbagai sektor, menyokong visi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan
   masyarakat. Selain itu, koordinasi kebijakan juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi risiko ketidak seimbangan ekonomi. Misalnya, pengendalian inflasi yang dilakukan melalui kebijakan moneter harus didukung oleh kebijakan sektoral yang memastikan ketersediaan pasokan barang dan jasa yang memadai dengan harga stabil. Dengan demikian, melalui integrasi yang baik antara kebijakan makro dan sektoral, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Integrasi ini harus terjalin dari pusat sampai ke level daerah, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

   Dalam era di mana sustainability semakin diakui sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan daerah, penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaporkan dampak keberlanjutan masyarakat dengan transparan dan akuntabel. Inilah sebabnya

mengapa standar keberlanjutan tingkat global menjadi sangat penting. Dalam konteks global, adopsi standar sustainability yang tinggi membantu menciptakan lingkungan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan, di mana organisasi dapat dibandingkan dan dievaluasi. Hal ini memungkinkan stakeholders untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan berkelanjutan.

4. Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan

   Transisi energi menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur mapan yang bergantung pada keterbatasan sumber daya, ketidakpastian ekonomi, dan resistensi politik dari pihak yang terpengaruh secara ekonomi. Meskipun begitu, transisi energi juga membawa peluang besar untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memajukan teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Dengan memperhatikan aspek ini secara serius, transisi energi bisa menjadi sarana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kolaborasi global dalam menghadapi tantangan transisi energi dapat memperkuat solidaritas internasional dan membangun kerangka kerja yang inklusif untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengadopsi teknologi dan praktik terbaru. Tantangan Transisi Energi menggaris bawahi perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam mengelola perubahan energi. Hal ini, tidak hanya melibatkan kebijakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan bahwa manfaat dari transisi energi dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, baik di tingkat local maupun global.

5. Aging Population Negara Maju

   Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengindikasikan bahwa sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk KabupatenTapanuli Tengah, akan segera mengalami fase penuaan populasi pada tahun 2024. Aging population, yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk berusia 65

tahun keatas melebihi 7% dari total populasi, menjadi perhatian serius.Tantangan penuaan penduduk yang dini di Indonesia menjadi focus perencanaan strategis pemerintah, terutama dalam upaya mencapai target menjadi Indonesia Emas 2045. Untuk mengantisipasi dampak penuaan populasi, pemerintah telah Menyusun upaya strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Strategi ini mencakup langkah-langkah untuk memperkuat program perlindungan sosial, pembangunan masyarakat, dan lingkungan yang ramah bagi penduduk lanjut usia. Melalui kesempatan ini, diharapkan kesadaran dan komitmen untuk mempersiapkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan inklusif semakin meningkat, terutama dalam rangka merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.

B. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan. Permasalahan tersebut merupakan gap expectation antara kinerja yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Oleh karena ada kesenjangan yang terjadi, maka perlu diidentifikasi permasalahan yang mengakibatkan kesenjangan tersebut. Dengan adanya permasalahan, pemerintah daerah dapat menetapkan program-program kedepannya sehingga terjadi akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. Permasalahan Kondisi Geografi

   a. Kondisi topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dengan kondisi struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur;
   b. Sebagian besar wilayah termasuk kedalam Kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin putting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain)

sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan mitigasi bencana;

c. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan.

2. Permasalahan kondisi demokrafis
   a. Masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecendrungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2025-2029;
   b. Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayan sosial, Kesehatan, Pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah yang padat/perkotaan;
   c. Migrasi penduduk mengakibatkan banyak migrasi keluar yang besar dilakukan oleh usia produktif, sementara angka ketergantungan Sumatera Utara masih sebesar 48,65 persen (2024) artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48-49 jiwa usia tidakproduktif;
   d. Angka usia produktif terus bertambah, sementara penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang memasuki masa produktif tidak balance (seimbang). Kalua itu terus terjadi kesenjangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit;

3. Permasalahan kesejahteraan ekonomi
   a. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja

      Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2 dekade terakhir yang dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2025 sebesar 10,98% dan menurun menjadi 5,60% pada Tahun 2024, namun kondisi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 4,91%. Tingginya tingkat pengangguran sangat mempengaruhi produktivitas tenagakerja. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Tingkat Produktivitas tenaga kerja Sumatera Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp 79,77 juta/tenaga kerja, kondisi ini lebih rendah

dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar Rp 87,96 juta/tenagakerja. Tingkat pengangguran yang tinggi dan produktivitas tenaga kerjayang rendah didorong oleh beberapa permasalahan antara lain rendahnya Human Capital (pendidikan dan kesehatan), penguasaan teknologi yang kurang, inovasi yang terbatas, kondisi budaya dan etoskerja yang masih minim, dan infrastruktur yang tidakmerata.

b. Belum optimalnya daya saing Perekonomian Sumatera Utara

Daya saing perekonomian Sumatera Utara yang belum optimal dapat dilihat dari :

1. Sektor industry pengolahan berbasis produk unggulan daerah yang belum berkembang secara maksimal, hal ini dapat dilihat daristagnannya kontribusi industry pengolahan di Sumatera Utara meskipun kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan terus meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya hilirisasi industry sektor riil (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan), serta tingginya biaya produksi antara lain bahan baku, bahan bakar, tenaga listrik dan gas, barang lainnya (di luar bahan baku/penolong) serta sewa gedung, mesin dan alat-alat;
2. Daya saing ekonomi kreatif yang masih rendah. Perkembangan ekonomi kreatif di Sumatera Utara belum mencapai tingkat kemajuan yang ideal, sektor ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, kurangnya promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif yang belum maksimal, system pembiayaan yang belum memadai, dan kekurangan infrastruktur fisik dan non-fisik yang cukup. Selain itu, peraturan ekonomi kreatif, penghargaan masyarakat terhadap kreativitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kreatif, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan warisan budaya lokal, dan standarisasi produk juga perlu ditingkatkan. Salah satu faktornya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM baru, dan kualitas produk IKM dan UMKM juga masih tertinggal khususnya dalam hal pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat wajib seperti Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan

Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA) maupun standarisasi dan sertifikasi yang bersifat umum seperti Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, sertaterkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten. Selain itu juga dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat khusus seperti Organik, Eco-friendly, Fair Trade, atau Vegan masih sangat terbatas;

3. Daya saing sektor pariwisata yang rendah. Sektor pariwisata di Sumatera Utara menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah serta menyediakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan PDRB belum optimal. Meskipun memiliki Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas sekaligus bagian dari UNESCO Global Geopark. Rendahnya daya saing sector Pariwisata ditunjukkan melalui kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dan masih berada pada nilai yang cukup rendah, yaitu di bawah 3%. Hal ini disebabkan antara lain: (i) masih terbatasnya aksesibilitas, amenitas, atraksi, aktivitas, ancillary dan available packages di destinasi wisata; (ii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata serta kemitraan dalam pengembangan destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata; dan (iii) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata. Selain itu, disrupsi dan perubahanpreferensi pasar disebabkan oleh digitalisasi, teknologi, dan bencana. Karena transformasi digital yang tidak merata dan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, potensi ekonomi kreatif belum dimanfaatkan dengan baik. Serta, belum ada ekosistem yang mendukung komersialisasinya, kurangnya inovasi dan pengembangan produk, marketing digital, sertakurangnya branding dan investasi infrastruktur pariwisata sehingga terbatasnya akses ke pasar global;

4. Rendahnya investasi pada sector riil seperti industry pengolahan (agroindustri), industry kemaritiman, industry makanan, dan industry manufaktur. Kondisi ini dapat dilihat dari lambatnya perkembangan investasi pada KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, KIM Medan dan DPSP Danau Toba serta Kawasan Strategis Ekonomi lainnya;

c. Disparitas penduduk miskin perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi
Walaupun tangkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan dan lebih bagus dari capaian nasional, namun jika dilihat berdasarkan tempat tinggal maka jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih banyak jika dibandingkan daerah perkotaan. Beberapa factor penyebabnya antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor – sector ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah, selain itu tingginya beban pengeluaran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin yang disebabkan masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya Kesehatan, biaya Pendidikan dan biaya perumahan;

4. Permasalahan kesejahteraan sosial dan budaya
   a. Pembangunan Kesehatan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik Kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif, lansia dan layanan Kesehatan mental. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas system Kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat;
   b. Permasalahan Pendidikan antara lain belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi Pendidikan antar wilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas Pendidikan masih rendah yang

disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan yang belum memadai, serta kuantitas, kualitas dan distribusi guru yang masih terbatas;

c. Belum optimalnya penurunan tingkat kemiskinan dan perlindungan dalam menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Integrasi program bantuan sosial belum maksimal, terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompokrentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk;
d. Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat procedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi Lembaga perwakilan;
e. Belum maksimalnya kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan serta belum optimalnya penguatan dan penanaman nilai-nilai agama di masyarakat;
f. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, selain itu Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia juga belum optimal;
g. Ketimpangan gender yang masih tinggi sehingga kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud;
h. Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya impelementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Ancaman negative budaya asing berdampak kepada hilangnya karakter dan jati diri asli masyarakat Sumatera Utara. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan;

5. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan

Dengan memedomani upaya penyelesaian permasalahan pembangunan, Provinsi Sumatera Utara mengangkat isu-isu strategis pembangunan sebagai berikut:

a. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan Kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan system kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan Pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya system demokrasi masih procedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi public belum merata; permasalahan politik electoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta system kaderisasi partai politik belum maksimal. Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan

harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan social budaya dan ekologi.Dalam halini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

b. Pengembangan Pariwisata dan ekonomikreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas kedestinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya Tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikanjalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi factor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sector pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk local dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengandemikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industry pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi focus dalam pengembangan sector ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di Kawasan wisata harus ditingkatkan.

c. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeailan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons kedepan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka Panjang kedepan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi Kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara. Layanan ketenaga listrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenagalistrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hamper menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi,

banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek Kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagaidst. Kondisi deficit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkatkonsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu kewaktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi Kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air

permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbahcair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

d. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

   Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesatmenjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan

   Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada

beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, halinilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan. Perubahaniklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau. Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera. Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas

masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan factor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tamping lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

f. Peningkatan konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan system logistic berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama, yaitu memperbaiki tata Kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

Isu-isu berkaitan dengan tata Kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasidalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dar iobjek menjadi subjek pembangunan.

C. Isu Strategis KabupatenTapanuli Tengah

Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah pada periode 2025-2029 ini merupakan estafet dari pembangunan daerah sebelumnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2029 nanti.

Berbagai capaian telah diraih oleh Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah sehingga tidak dapat dipungkiri pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif pada pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Namun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang menyertai sehingga perlu adanya antisipasi dan penyelesaian secara terintegratif pada kebijakan pembangunan, khususnya dalam meredam berkembangnya permasalahan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis yang berkembang bersifat dinamis, khususnya berbagai fenomena yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi capaian pembangunan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan kedepan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis difokuskan kepada kondisi terkini dan telaah terhadap isu strategis internasional, nasional dan regional.

Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional maupun internasional harus ditelaah dan dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah periode pembangunan 2025-2029 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan sampai perumusan program prioritas.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Tapanuli Tengah dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi hirilisasi industry berbasis SDA

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, focus utama adalah pada optimalisasi hilirisasi industry berbasis Sumber Daya Alam (SDA), dengan menonjolkan potensi pertanian dan pariwisata alam. Dalam sektor pertanian, upayaakan difokuskan pada peningkatan produksi dan diversifikasi produk pertanian lokal, perkebunan yang berkelanjutan serta penguatan rantai pasokan dan nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan yang lebih baik. Sementara itu, pariwisata alam akan dikembangkan melalui promosi destinasi wisata yang mengutamakan keindahan alam dan budaya lokal, dengan membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan pelayanan wisata yang berkualitas. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal potensi SDA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

b. Akselarasi pemenuhan konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar berkualitas

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, focus utama adalah pada akselerasi pemenuhan konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan jaringan transportasi yang memadai, termasuk perbaikan dan pengembangan jalan raya utama serta jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Langkah ini tidak hanya akan mempermudah aksesibilitas penduduk lokal dalam beraktivitas sehari-hari tetapi juga akan membuka akses ke pasar

regional dan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Selain itu, perluasan jaringan transportasi akan mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien dari dan kedaerah pedalaman. Selain infrastruktur transportasi, akselerasi ini juga mencakup peningkatan infrastruktur dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan dan perluasan sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan sarana pendukung lainnya akan memastikan bahwa penduduk di KabupatenTapanuli Tengah memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.

c. Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, focus utama adalah pada upaya mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul. Langkah pertama adalah memperkuat system pendidikan, mulai dari peningkatan akses Pendidikan prasekolah hingga perguruantinggi, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan. Ini meliputi investasi dalam fasilitas pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penting untuk memperkuat pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, terutama dalam sektor-sektor yang mendukung perekonomian local seperti pertanian, pariwisata, dan industry kreatif. Selanjutnya, upaya mewujudkan SDM yang sehat akan diperkuat dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ini termasuk pembangunan dan perluasan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sarana Kesehatan lainnya di seluruh kabupaten. Program-program Kesehatan masyarakat yang efektif juga akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Selain itu, Pendidikan tentang kesehatan mental juga akan diberikan perhatian untuk memastikan kesejahteraan psikologis masyarakat secara keseluruhan. Dengan mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul,

Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas individu untuk bersaing di pasar kerja global tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi penddukTapanuli Tengah.

e. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

Pada periode 2025-2029, Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan isu akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai bagian integral dari agenda pembangunan jangka menengah. Langkah utama dalam upaya ini adalah meningkatkan akses terhadap lapangan kerja produktif melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat terpinggirkan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerjalokal dan regional, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selain itu, upaya akselerasi ini juga melibatkan penguatan system perlindungan social untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program bantuan sosial yang tepat sasaran akan diperkuat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam membangun kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga.

f. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi

Pada periode pembangunan 2025-2029, Kabupaten Tapanuli Tengah menghadapi tantangan serius terkait dengan ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi. Isu ini meliputi berbagai aspek, mulai dari deforestasi dan degradasi lahan hingga penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis akan diterapkan dengan fokus pada pemulihan ekosistem yang terganggu, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap habitat satwa liar serta ekosistem kritis. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk penggunaan teknologi hijau dan praktik konstruksi ramah lingkungan. Selain itu, upaya perlindungan dan restorasi

hutan serta lahan basah akan ditingkatkan untuk mempertahankan fungsi ekologisnya yang vital dalam mengatur tata air dan menjaga keanekaragaman hayati. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sector swasta akan menjadi kunci dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat juga akan ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan meningkatkan ketahanan ekologi sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

g. Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas

Pemerintah daerah berperan sebagai pendukung dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan terus meningkatkan kualitas tata kelolanya melalui peningkatan kapasitas ASN yang profesional, penerapan system pemerintahan yang adil dan transparan berbasis digital, serta adaptif terhadap berbagai perubahan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memperkuat kapasitas ASN melalui pelatihan, penerapan system meritokrasi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan mendorong kinerja ASN yang lebih baik dengan dukungan fasilitas kantor melalui pembangunan Gedung kantor yang baru dan tertata dengan baik. Tidak kalah pentingnya, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal akan tetap dipertahankan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

1.6. Ruang Lingkup

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selama Tahun 2025. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2025 tersebut di perbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana kinerja, ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan dating.

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut menjelaskan informasi kinerja menurut sasaran strategi Rencana Pembagunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025–2029, RKPD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sistimatika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menjelaskan secara ringkas latarbelakang struktur organisasi serta aspek strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

BAB II : Perencanaan dan Penatapan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah KabupatenTapanuli Tengah tahun 2025 serta hasil kinerja yang diperjanjikan;

BAB III : Akuntabilitas kinerja tahun 2025 menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2025;

BAB IV : Penutup menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatan;

.BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kinerja

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa yang akan dating melalui urutan pilihan atau prioritas dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam waktu tertentu. Berdasarkan pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka sebagai salah satu Kabupaten dengan Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2024, Kabupaten Tapanuli Tengah harus Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga tahun 2029, serta menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya hingga tahun 2029. Dalam menentukan tujuan dan sasaran daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan Dokumen Pencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah periode 20 tahun dan berfokus pada arah pembangunan strategis jangka Panjang. RPJMD harus selaras dengan RPJPD, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dalam 5 tahun mendukung pencapaian jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. RPJMD menjadi alat untuk menerjemahkan visi jangka panjang RPJPD kedalam Langkah-langkah kongret yang dapat diimplementasikan dalam jangka menegah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Bersama dengan para pemangku kepentingan dan berbagai pihak berkomitmen dan memiliki tujuan

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini ditunjukkan dalam tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan untuk meningkatkan berbagai aspek pembangunan secara seimbang dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki visi yaitu :

***"*MembangunTapanuli Tengah Adil Untuk Semua, Lestari dan Berkeadilan"*.** Visi merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai, bersifat inspiratif dan jangka panjang. Ini memberikan ruang yang luas kepada masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan guna memberikan manfaat melalui pelaksanaan pembangunan. Dalam mewujudkan visi RPJMD di atas, ditentukanlah misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut. Misi dalam mendukung pencapaian visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Visi tersebut memilki makna :

1. **Adil untuk semua**

   Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. **Lestari**

   Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang asri memiliki lingkungan yang asri dan menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha dan bertempat tinggal.

3. **Berkeadaban**

   Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan harmonisasi keberagaman, kebenaran, dan berkeadilan sosial, serta memiliki daya saing unggul.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 9 misi pembangunan jangka menegah, Adapun 9 misi pembangunan menengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri,

   Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkarakter dan berkualitas untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang cerdas dan berdaya saing, serta terampil dan inovatif. Hal ini akan

dicapai melalui pembangunan pendidikan dan ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis digital, serta tenaga pendidik yang berkualitas.

2. Memastikan akses Kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani.

   Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, di mana seluruh masyarakat dari seluruh golongan dapat merasakannya. Peningkatan akses Kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis teknologi, sertadokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah.

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.

   Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasispotensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi.

   Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Darah juga akan dibenahi lebih baik lagi agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai sumber dana untuk membiayai keperluan pembangunan daerah.

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebasdarikorupsi, dan berkeadaban.

   Meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui implementasi system pemerintahan yang berbasis teknologi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang sama. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga akan meningkatkan kapasitas dan daya

saing ASN sehingga memberikan pelayanan yang professional kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.

   Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama.

7. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama.

   Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

   Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah secara optimal dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar sehingga menjaga kebersihan dari lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah akan meningkatkan pengelolaan lingkungan, mengatasi pencemaran lingkungan, melaksanakan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan.

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi.

   Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata keseluruh desa sehingga seluruh masyarakat dapat merasakannya. Masyarakat desa diberdayakan sehingga memiliki keterampilan yang baik dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya.

.Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indicator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum.

Untuk menjaga keselarasan pembangunan antara Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, perlu upaya sinkronasi indicator makro yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Berikut ini adalah perbandingan penetapan target indicator kinerja makro Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang tercantum dalam RPJMD KabupatenTapanuli Tengah Tahun 2025-2029.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis stratejik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 ada sebanyak 11 Indikator Kinerja Utama dan dijabarkan dalam 40 Sasaran Strategis dan 51 Indikator Sasaran sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1

Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5				
1.	**Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing**			**Indeks Pembangunan Manusia (poin)**	**74,55-76,76**	**74,91-77,16**	**75,27-77.56**	**75,63-77,96**	**75,99-78.36**
		1	Meningkatnya Inteletualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD (poin)	54,00	55,00	56,00	57,00	68,00
				Literasi SMP (poin)	62,50	63,00	63,50	63,80	64,00
				Numerasi SD (poin)	56,50	56,70	57,00	57,50	58,00
				Numerasi SMP (poin)	64,00	64,50	65,00	66,00	67,00
		2	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (poin)	50,00	51,86	53,78	55,78	57,85
		3	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	10,00	12,01	14,43	17,33	20,81
2.	**Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan wirausaha**								
		4	Meningkatnya kesempatan dan produkstivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas tenaga kerja (Rp/Jiwa)	68,76	70,14	71,54	72,97	74,43
		5	Meningkatnya konteribusi UMKM dalam Perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	0,50	0,66	0,87	1,15	1,52
3.	**Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat**								
		6	Meningkatnya derajad Kesehatan masyakarat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis (treatment success rate) (%)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
				Jumlah kematian ibu	4	4	4	4	4
				Prevalensi stuanting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	29,25	26,20	23,25	20,10	17,05
		7	Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60
4	**Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**			**Persentase Pendudki Miskin (%)**	**10,20-9,53**	**9,68-8,99**	**9,19-8,48**	**8,72-8,00**	**8,28-7,54**
		8	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio (poin)	0,230-0,240	0,227-0,237	0,224-0,234	0,221-0,231	0,218-0,228
		9	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks kesejahteraan social (poin)	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82
		10	Terjaganya stabilitas kebutuhan poko	Inflasi (%)	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00

1	2	3		4	5				
		11	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks ketahan pengan (poin)	74,00	75,16	76,34	77,54	78,76
5.	**Meningkatnya pendapatan masyarakat**			**PDRB perkapita (Rp. Juta)**	**35,40**	**40,78**	**46,97**	**54,10**	**70,19**
		12	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar petani (poin)	90,00	93,69	97,52	101,52	105,67
		13	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar nelayana (poin)	95,00	97,83	100,74	103,73	106,82
		14	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	20,00	22,97	26.39	30,31	34,82
		15	Meningkatnya ksejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan jaminan soail ketenagakerjaan	10,00	13,20	17,41	22,97	30,31
6.	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing**			**Pertumbuhan ekonomi (%)**	**4,33-4,47**	**4,34-4,50**	**4,35-4,53**	**4,36-4,56**	**4,37-4,59**
		16	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	11,61-11,80	12,02-12,24	12,49-12,70	12,95-13,17	13,43-13,66
		17	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan minum (%)	1,32-1,39	1,35-1,42	1,38-1,45	1,42-1,48	1,46-1,51
		18	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Proporsi jumlah UMKM non pertanian (%)	70,00	80,00	85,00	87,00	90,00
				Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,073	0,094	0,122	0,157	0,203
		19	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi (%)	10,50	11,03	11,58	12,16	12,76
		20	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	12,79	13,18	13,57	13,98	14,40
		21	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks masyarakat digital (poin)	41,25	42,35	43,45	45,50	47,07
7.	**Meningkatnya kemadirian Daerah**								
		22	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Rasio Pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,38-0,48	04 – 0,5	0,42-0,45	0,44-0,54	0,46-0,57
		23	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapoatan daerah	Rasio BUMD (%)	6,25	6,85	7,52	8,25	9,04
		24	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan (level)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

1	2	3		4	5				
8.	**Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel**			**Indeks Reformasi Birokrasi (poin)**	**60-70**	**61,23-71,26**	**62,48-72,54**	**63,76-73,85**	**65,07-75,18**
		25	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks pelayanan publik (poin)	3,55	3,64	3,73	3,81	3,91
				Indeks kepuasan masyarakat (poin)	85,46	86,69	87,75	88,86	89,00
		26	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN (poin)	64,30	66,25	68,75	71,50	73,75
		27	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	**Indeks Demokrasi Indonesia (poin)**	**70,00**	**71,89**	**73,84**	**75,84**	**77,89**
				Indeks Harmoni Indonesia (poin)	**6,30**	**6,40**	**6,50**	**6,60**	**6,70**
9.	**Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis**			**Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)**	**75,00**	**76,00**	**77,00**	**78,00**	**79,00**
		28	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga (poin)	48,88-57,64	49,12-57,64	49,36-57,64	49,6-57,64	49,84-57,64
		29	Terwujudnya berkebudaan maju	Persentase budaya yang dilestarikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		30	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		31	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlidungan anak	Indeks ketimpangan gender (poin)	0,425-0,395	0,405-0,375	0,395-0,365	0,390-0,360	0,380-0,350
				Indeks perlindungan anak (poin)	55,80	56,10	56,40	56,70	57,00
10.	**Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah**			**Indeks Infrastruktur (poin)**	65,00	66,42	67,86	69,34	70,85
		32	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks kepuasan layanan insfrastruktur (poin)	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44
				Persentase Rumkah Tangga dengan akses sanitasi aman (poin)	10,00	10,94	11,96	13,08	14,31
				Persentase Rumah Tangga dengan akses air imun aman (poin)	0,50	0,91	1,66	3,02	5,49
		33	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio konektivitas (%)	83,33	83,33	83,87	83,87	87,10
		34	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelnjutan (%)	86,04	88,62	91,28	94,01	96,83

	2	3		4	5				
		35	Meningkatnya infrastruktur yang resilien terhadap bencana	Indeks resiko bencana (poin)	172,42	163,79	155,60	147,82	140,83
11.	**Terwujudnya pembangunan yang berwawasn lingkungan hidup**			**Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)**	81,81	81,98	82,15	82,32	82,50
		36	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Porsi EBT dalam bauran energi (%)	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66
		37	Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbunan sampah (ton)	66.000,00	64,753,82	63.531,17	62.331,61	61.154,69
		38	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Penurunan emisi GRK (ton CO2eg)	142.488,58	164.124,30	189.045,24	217.750,21	242.844,49
12.	**Terwujudnya pembangunan desa yang merata**			**Indeks Desa (%)**	57,00	58,39	59,54	61,24	63,29
		39	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase desa mandiri (%)	1,26	1,89	2,52	3,14	4,40
		40	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan daerah (poin)	70,00	73,61	77,40	81,39	85,59

Sumber RPJMD KabupatenTapanuli Tengah 2025-2029

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Organisasi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Sebagaimana regulasi dimaksud maka alat ukur keberhasilan Rencana Pemabngunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 tercermin dari tingkat capaian dan realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapanuli Tengah telah tercantum dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tapanuli Tengah 2025–2029

No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	73,34	74,55-76,76	74,91-77,16	75,27-77,56	75,63-77,96	75,99-78,36
2	Persentase Pendudk Miskin (%)	11,80	10,20-9,53	9,68-8,99	9,19-8,48	8,72-8	8,28-7,54
3	PDRB per Kapita (Rp juta)	34,62	35,40	40,78	46,97	54,1	70,19
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,15	4,33-4,47	4,34-4,5	4,35-4,53	4,36-4,56	4,37-4,59
5	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	CC			2,41	2,47	2,53
6	Indeks Demokrasi Indonesia (poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89
7	Indeks Harmoni Indonesia (poin)	N/A	6,30	6,40	6,5	6,6	6,7
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	N/A	75,00	76,00	77	78	79
9	Indeks Infrastruktur (poin)	N/A	65,00	66,42	67,86	69,34	70,85
10	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (poin)	76,27	81,81	81,89	82,15	82,32	82,5
11	Indeks Desa (%)	0,6023 (IDM)	57,00	58,39	59,54	61,24	63,29

Sumber : RPJMD KabupatenTapanuli Tengah2025-2029

2.4.Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima Amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima Amanah untuk sama – sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029. Oleh karena itu indikator – indicator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indicator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Perjanjian Kinerja Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD	Poin	54,00
		Literasi SMP	Poin	62,50
		Numerasi SD	Poin	56,50
		Numerasi SMP	Poin	64,00
2.	Meningkatnya literasi masyarakat	Indekspembangunanliterasi masyarakat	Poin	50,00
3.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi ditingkat provinsi dan nasional	%	10,00

4.	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp/jiwa	68,76
5.	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	0,50
6.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate)	%	90,00
		JUmlahkematianibu	Jlh	4
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)	%	29,25
7.	Terwujudnya pelayan kesehatan yang inklusif	Cakupan Kesehatan jaminan Kesehatan Nasional	%	98,60
8.	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	Poin	0,230- 0,240
9.	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks kesejahteraan sosial	Poin	40,00
10.	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	1,00- 3,00
11.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks ketahanan pangan	Poin	74,00
12.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	Poin	90,00
13.	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai tukar nelayan	Poin	95,00
14.	Meningkatnya pertisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	%	20,00
15.	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan	%	10,00
16.	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sector industri terhadap PDRB	%	11,61- 11,80
17.	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan, minum	%	1,32- 1,39
18.	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Proporsi jumlah UMK non pertanian	%	70,00
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,073
19.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	%	10,50

20.	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	12,79
21.	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks masyarakat digital	Poin	41,25
22.	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,38- 0,48
23.	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah	Rasio BUMD	%	6,25
24.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	Level	WTP
25.	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks pelayan publik	Poin	3,55
		Indeks kepauasan masyarakat	Poin	85,46
26.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Poin	64,30
27.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	70,00
		Indeks harmoni indonesia	Poin	6,30
28.	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga	Poin	48,88- 57,64
29.	Terwujudnya berkebudayaan maju	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100,00
30.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	%	100,00
31.	Meningkatnya kesetaran gender dan perlindungan anak	Indeks ketimpangan gender	Poin	0,425- 0,395
		Indeks perlindungan anak	Poin	55,80
32.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Poin	50,00
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	10,00
		Persentase rumah tangga dengan akses air minumaman	%	0,50
33.	Terwujudnyal ayanan transportasi yang Nyaman, aman dan terjangkau	Rasiokonektivitas	%	83,33
34.	Terpenuhinya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan	%	86,04

		akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan		
35	Meningkatnya infrastruktur yang resilien terhadap bencana	Indeks resiko bencana	Poin	172,42
36.	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Porsi EBT dalam bauran energi	%	20,00
37.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbunan sampah	Ton	66.000,00
38.	Menurunnya emisi Gas rumah tangga	Penurunan emisi GRK (ton CO2eg)	Ton	142.488,58
39.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	%	1,26
40.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Poin	70,00

Sumber RPJMD KabupatenTapanuli Tengah 2025-2029

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu dasar rujukan yang dilihat adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pengemban Amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indicator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakuka nevaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran. Setiap Instansi Pemerintah wajib Menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana yang tercantum dalam table di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Huruf	Range Nilai	Kategori
1.	AA	Sangat Memuaskan	90,01 - 100
2.	A	Memuaskan	80,01 - 90
3.	BB	Sangat Baik	70,01 - 80
4.	B	Baik	60,01 -70
5.	CC	Cukup	50,01 - 60
6.	C	Kurang	30,01 - 50
7.	D	Sangat Kurang	0 - 30

Sumber :Kemenpan RB

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab–sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2025 memperjanjikan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari 40 Sasaran dan 51 Indikator sasaran.

3.1.Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Dalam melaksanakan roda Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pengemban Amanah dari masyarakat melaksanakan kewajiban Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanhkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing–masing kelompok Indikator Kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing–masing Indikator Kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2025 dengan merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, berdasarkan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indicator sasaran. Kemudian atas hasil Pengukuran Kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapain sasarandan program/kegiatan serta indicator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.2.1
Interprestasi atas pencapaian sasaran

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebihdari 100%	Sangat Baik
2.	75 % - 100 %	Baik
3.	55% - 75 %	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang
5.	0	Data tidakada/tidak lengkap

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam perhitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen ralisasi dalam kondisi sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah Tahun 2025 telah melaksanakan Kinerja yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang terdiri dari 40 Sasaran dan 51 Indikator sasaran, hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tahun 2025		Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing		Harapan lama sekolah	13,59-13,79	13,50	97,89%	Baik
		Rata-rata lama sekolah	9,17-9,72	10,08	103,70%	Sangat Baik
1.	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Lterasi SD	54,00	52,81	97,79%	Baik
		Literasi SMP	62,50	62,39	99,82%	Baik
		Numerasi SD	56,50	56,17	99,42%	Baik
		Numerasi SMP	64,00	63,04	98,50%	Baik

2.	Meningkatnya Literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi	50,00	45,00	90%	Baik
3.	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	10,00	4,09	40,9%	Kurang
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan wirausaha		Tingkat pengangguran terbuka	7,65- 7,49	7,21	96,26%	Baik
4.	Meningkatnya Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	68,76	39,86	57,97%	Cukup
5.	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	0,50	0,24	48%	Kurang
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		Umur harapan hidup	71,93-72,11	72,20	100,12%	Sangat Baik
6.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate)	90,00	79	87,78%	Baik
		Jumlah kematian ibu	4	4	100%	Baik
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)	29,25	1,8%	6,15%	Kurang
7.	Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang inklusif	Cakupan Kesehatan jaminan Kesehatan nasional	98,60	100,00	101,42%	Sangat Baik
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Persentase penduduk miskin	10,20-9,53	11,03	108,13%	Sangat Baik
8.	Meningkatnya ketimpangan pendapatan	Gini Rasio	0,230-0,240	0,251	104,58%	Sangat Baik
9.	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks kesejahteraan sosial	40,00	54,49	136,22%	Sangat Baik
10.	Terjaganya Stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	1,00-3,00	1,3	17,33%	Cukup
11.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks ketahanan pangan	74,00	75,24	98,35%	Baik
Meningkatkan pendapatan masyarakat		PDRB per kapita	35,40	36,77	103,80%	Sangat Baik

12.	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani	90,00	-	0%	Data belum dapat disajikan
13.	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai tukar nelayan	95,00	-	0%	Data belum dapat disajikan
14.	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Pesentase penyanang disabiltas bekerja disektor formal	20,00	4	20%	Kurang
15.	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rantan (dektor informal)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	10,00	20	200%	Sangat Baik
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing		Pertumbuhan ekonomi	4,33-4,47	3,25	72,70%	Cukup
16.	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,61-11,80	11,00	93,22%	Baik
17.	Meningkatnya nilaqi tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan-minum	1,32-1,39	1,33	95,68%	Baik
18.	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Proporsi jumlah UMK non pertanian	70,00	33,00	47,14%	Kurang
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0,073	1,88	2575,34%	Sangat Baik
19.	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	10,50	19,68	187,43%	Sangat Baik
20.	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,79	12,32	96,32%	Baik
21.	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks masyarakat digital	41,25	39,92	96,78%	Baik
Meningkatnya kemandirian daerah		Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	7,49	8,68	115,89%	Sangat Baik
22.	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	0,38-0,48	0,30	62,50%	Cukup
23.	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah	Rasio BUMD	6,25	10,70	171,20%	Sangat Baik
24.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan	Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Baik

	akuntabel					
Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	60-70	53,68	78,69%	Baik
25.	Terciptanya tata pemerintahan yang tarnsparan dan akuntabel	Indeks pelayan publik	3,55	2,30	64,79%	Cukup
		Indeks kepuasan masyarakat	85,46	93,33	109,21%	Sangat Baik
26.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	64,30	62,15	96,66%	Baik
27.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks demokrasi Indonesia	70,00	-	0%	Data belum dapat disajikan
		Indeks harmoni Indonesia	6,30	-	0%	Data belum dapat disajikan
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis		Indeks kerukunan umat beragama	75,00	77.89	103,85%	Sangat Baik
28.	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga	48,88-57,64	57,50	99,76%	Baik
29.	Terwujudnya berkebuadayaan maju	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	100,00	100,00	100%	Baik
30.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	100%	Baik
31.	Meningkatnya kesejahteraan gender dan perlindungan anak	Indeks ketimpangan gender	0,425-0,395	0,410	96,47%	Baik
		Indeks perlindungan anak	55,80	65,00	116,49%	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur	65,00	78,58	120,89%	Sangat Baik
32.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	50,00	66,42	132,84%	Data belum dapat disajikan
		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	10,00	42,81	428,1%	Sangat Baik
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman	0,50	61,13	122,26%	Sangat Baik
33.	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan	Rasio konektivitas	83,33	83,33	100%	Baik

	terjangkau					
34.	Terpenuhinya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layan terjangkau dan berkelanjutan	86,04	83,56	97,12%	Baik
35.	Meningkatnya infrastruktur yang resilien terhadap bencana	Indeks resiko bencana	172,42	230,41	133,63%	Sangat Baik
Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup	57,97	80.77	139,33%	Sangat Baik
36.	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Porsi EBT dalam bauran energi	20,00	30,8%	154%	Sangat Baik
37.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbunan sampah	66.000,00	50.000,00	75,76%	Baik
38.	Menurunnya emisi gas rumah tangga	Penurunan emisi GRK (ton CO2eg)	142.488,58	156,73	109,99%	Sangat Baik
Terwujudnya pembangunan desa yang merata		Indeks desa	57,00	57,37	100,65%	Sangat Baik
39.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	1,26	1,88	149,21%	Sangat Baik
40.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Indeks perencanaan pembangunan daerah	70,00	-	0%	Dalam proses penilaian

Sumber RPJMD KabupatenTapanuli Tengah 2025-2029

3.3 Analisa Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan program, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing – masing kelompok indicator sasaran, yaitu kelompok indicator kinerja input, output, dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen perencanaan kinerja dengan realisasinya, atau rencana kinerja (performance plans) yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) atau factor keberhasilan kinerja sasaran tersebut.

Capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 pada awalnya dilakukan berdasarkan Program/Kegiatan sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja awal, namun seiring dengan terjadinya perubahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka perbaikan Dokuman SAKIP dan juga akibat peralihan periode kepemimpinan Kepala Daerah, untuk lebih baik kedepannya sehingga dilakukanlah perubahan perencanaan kinerja.

Pada pengukuran capaian kinerja memiliki beberapa sasaran yang lebih kompleks dan dinamis, dimana setiap sasaran melibatkan beberapa OPD terkait sehingga dalam pencapaian sasaran dapat lebih maksimal, karena pembagian tugas yang baik sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD sehingga dalam pencapaian sasaran terjadi saling melengkapi antara satu OPD dengan OPD lainnya.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Bersama segenap komponen masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama, Meningkat kankualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing

Tujuan pertama, yaitu Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berdayasaing, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah

Tabel 3.3.1

Analisis Capaian Sasaran 1
Meningkatnya inteletualitas dan karakter anak usia sekolah

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Literasi SD	Poin	N/A	-	-	54,00	52,81	97,77%	Baik
2.	Literasi SMP	Poin	N/A	-	-	62,50	62,19	99,50%	Baik
3.	Numerasi SD	Poin	N/A	-	-	56,50	56,17	99,42%	Baik
4.	Numerasi SMP	Poin	N/A	-	-	64,00	63,04	98,50%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran dapat dilihat dari 4 (empat) indicator sasaran. Untuk indikator sasaran nilai Literasi SD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 54,00 dan realisasi 52,81**,** capaian kinerja tahun 2025 97,77%**,** Selanjutnya pada indicator sasaran Literasi SMP tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0%, dan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 62,50 dan realisasi 62,19 dengan capaian kinerja 99,50, Selanjutnya pada Indikator Sasaran Numerasi SD tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0 dengan capaian kinerja tahun 2024 0%, dan pada tahun 2025 memiliki target 56,50 dan realisasi 56,17 dengan capaian kineja tahun 2025 sebesar 99,42%, indikator sasaran Numerasi SMP tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0 dengan capaian kinerja 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 64,00 dan realisasi 63,04 dengan capaian kinerja 98,50% maka pencapaian kinerja pada sasaran 1 adalah sebesar 98,77% dengan interprestas **BAIK.**

- **Literasi dan Numerasi**

Literasi merupakan kemampun seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi yang diberikan, sementara numerasi merpakan kemampuan untuk berpikir secara logis dengan menerapkan konsep matematika.

Sasaran 2 Meningkatnya Literasi Masyarakat

Tabel 3.3.2

Analisa Capaian Sasaran2
Meningkatnya literasi masyarakat

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	Indeks Literasi Masyarakat	Poin	N/A	-	-	50,00	45,00	90%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran dapat dilihat dari indikator sasaran nilai Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 20240 dan pada tahun 2025 memiliki target 54,00 dan realisasi 45,00**,** capaian kinerja tahun 2025 90%, maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 90% dengan interprestas **BAIK.**

- **IndeksLiterasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indeks yang mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Sasaran 3 Meningkatnya Prestasi Olahraga

Tabel 3.3.3

Analisa Capaian Sasaran 3
Meningkatnya Prestasi Olahraga

No	Indikatorsasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	Persentasi atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Poin	N/A	-	-	10,00	4,09	40,9%	Kurang

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran dapat dilihat dari indikator sasaran Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 10,00 dan realisasi 4,09 capaian kinerja tahun 2025 40,9%, maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 40,9% dengan interprestas **Kurang.**

- **Persentase atlet berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan pemerintah dalam membentuk generasi muda yang sehat, berdaya saing, dan berkarakter. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung potensi pemuda serta memajukan sector olahraga.

2. Tujuan Kedua, Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha

Tujuan kedua, yaitu Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan wirausaha, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 4.Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tabel 3.3.4

Analisa Capaian Sasaran 4
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp./jiwa	67,41	34,62	51,36%	68,76	39,86	57,97%	Cukup

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran dapat dilihat dari indikator sasaran Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2024 memiliki target 67,41 dan realisasi 34,62, capaian kinerja tahun 2024 51,36% dan pada tahun 2025 memiliki target 68,76 dan realisasi 39,86 capaian kinerja tahun 2025 57,97% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 56,97% dengan interprestas **Cukup.**

- **Tingkat produktivitas tenaga kerja**

Urusan Tenaga Kerja merupakan urusan pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi calon tenaga kerja.

Sasaran 5 Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian

Tabel 3.3.5
Analisa Capaian Sasaran 5
Meningkatnya kontribusi UMKM dalam Perekonomian

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	N/A	-	-	0,50	0,024	48%	Kurang

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran dapat dilihat dari indikator sasaran Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 0,50 dan realisasi 0,024**,** capaian kinerja tahun 2025 48% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 48% dengan interprestas **Kurang.**

- **Kontribusi UMKM terhadap PDRB**

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan urusan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan daya saing koperasi serta UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, mendorong inovasi, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasankemiskinan.

3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tujuan ketiga, yaitu Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.3.6

Analisa Capaian Sasaran 6
Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate)	%	68,57	93,5	136,36%	90,00	79,00	87,77%	Baik
2.	Jumlah kematian ibu	Jumlah	4	4	100%	4	4	100%	Baik
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)	%	32,30	0,18	0,56%	29,25	1,8	6,15%	Kurang

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator sasaran. Untuk indikator sasaran angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 memiliki target 68,57 dan realisasi 93,5, capaian kinerja tahun 2024 136,36% dan pada tahun 2025 memiliki target 90,00 dan realisasi 79,00 capaian kinerja tahun 2025 87,77%**,** Selanjutnya pada indikator sasaran Jumlah kematian Ibu tahun 2024 memiliki target 4 dan realisasi 4, capaian kinerja tahun 2024 100% dan pada tahun 2025 memiliki target sebesar 4 dan realisasi 4 dengan capaian kinerja 100% Selanjutnya pada Indikator Sasaran Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) tahun 2024 memiliki target 32,30 dan realisasi 0,18 dengan capaian kinerja tahun 20240, 56%, dan pada tahun 2025 memiliki target 29,25 dan realisasi 1,8 dengan capaian kineja tahun 2025 sebesar 6,15%, maka pencapaian kinerja pada 3 sasaran ini adalah sebesar 192,92% dengan interprestas **Sangat Baik.**

- **Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate)**

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat berdampak pada organ lain. Penyakit ini merupakan penyakit

menular yang perlu diperhatikan karena dadat berdampak bagi kualitas Kesehatan masyarakat.

- **Jumlah Kematian Ibu**

Kesehatan untuk Semu amerupakan komitmen pembangunan yang menjamin akses universal terhadap layanan Kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, melalui penguatan sistem Kesehatan primer berbasis Puskesmas dan Posyandu, perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan kualitas tenaga medis dan ketersediaan obat esensial di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan dengan fokus pada upaya promotif-preventif untuk menciptakan masyarakat sehat yang produktif dan berdaya saing.

- **Pravalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)**

Stunting adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu.sehingga pemerintah perlu memperhatikan akses dan layanan Kesehatan kepada masyarakat serta distribusi pangan yang merata agar seluruh masyarakat dapat mengonsumsi gizi yang seimbang.

Sasaran 7 Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Inklusif

Tabel 3.3.7

Analisa Capaian Sasaran 7
Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang inklusif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan Kesehatan jaminan Kesehatan nasional	%	91,41	97,41	93,84%	98,60	100	101,17%	Data belum diterima

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Inklusif dapat dilihat dari indikator sasaran Cakupan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2024 memiliki target 91,41 dan realisasi 97,41, capaian kinerja tahun 2024 93,84%, dan pada

tahun 2025 memiliki target 98,60 dan realisasi 100**,** capaian kinerja tahun 2025 101,17%, maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 100,17% dengan interprestas **Baik.**

- **Cakupan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional**

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Kesehatan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan daya saing SDM. Masyarakat yang sehat akan memiliki daya pikir yang lebih baik sehingga mendorong produktivitas suatu daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas kesehatan. Fasilitas Kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

4. Tujuan keempat, Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan keempat, yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 8 Meningkatnya ketimpangan pendapatan

Tabel 3.3.8

Analisa Capaian Sasaran 8
Meningkatnya ketimpangan pendapatan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gini Rasio	poin	0,234	0,234	100%	0,230-0,240	0,251	104,58%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan dapat dilihat dari indikator sasaran Gini Rasio tahun 2024 memiliki target 0,234 dan realisasi 0,234, capaian kinerja tahun 2024 100% dan pada tahun 2025 memiliki target 0,230-0,240 dan realisasi 0,251 capaian kinerja tahun 2025 104,58% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 103,58% dengan interprestas **Sangat Baik.**

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan/kekayaan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan absolut (satu orang menguasai semua pendapatan/kekayaan), 0,335 poin pada tahun 2020 menjadi 0,234 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin rendah. Namun, perlu diperhatikan apakah indeks yang semakin menurun ini menunjukkan semakin menurunnya pendapatan masyarakat sehingga mendekati masyarakat yang berpendapatan rendah atau sebaliknya.

Sasaran 9 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.3.9

Analisa Capaian Sasaran 9
Meningkatnya kesejahteraan sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks kesejahteraan sosial	poin	N/A	-	-	40,00	54,49	136,22%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks Kesejahteraan Sosial tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 40,00 dan realisasi 54,49 capaian kinerja tahun 2025 136,22% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 136,22% dengan interprestas **Sangat Baik.**

Sasaran 10 Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Tabel 3.3.10

Analisa Capaian Sasaran 10
Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Inflasi	%	N/A	-	-	1,00-3,00	1,3	17,33	Kurang

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Poko dapat dilihat dari indicator sasaran Inflasi tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 1,00-3,00 dan realisasi 1,3 capaian kinerja tahun 2025 17,33%, maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 17,33% dengan interprestasi **Kurang.**

Sasaran 11 Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan terjangkau

Tabel 3.3.11

Analisa Capaian Sasaran11

Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks ketahanan pangan	poin	73,81	72,18	97,79%	74,00	75,24	101,68%	Baik

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan Terjangkau dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks Ketahanan Pangan KabupatenTapanuli Tengah tahun 2024 memiliki target 73,81 dan realisasi 72,18, capaian kinerja tahun 2024 97.79% dan pada tahun 2025 memiliki target 74,00 dan realisasi 75,24**,** capaian kinerja tahun 2025 101,68%**,** maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 100,68% dengan interprestas **Baik.**

Urusan Pangan adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjamin pasokan pangan dalam memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya sehingga

mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebihsejahtera.

5. Tujuan kelima, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

Tujuan kelima, yaitu Meningkatkan pendapatan masyarakat, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 12 Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Tabel 3.3.12

Analisa Capaian Sasaran 12
Meningkatnya kesejahteraan Petani

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai tukar petani	poin	N/A	-	-	90,00	-	0%	Data belum dapat disajikan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani dapat dilihat dari indikator sasaran Nilai Tukar Petani tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 90,00 dan realisasi 0**,** capaian kinerja tahun 2025 0%, maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 0% dengan interprestas **Data belum dapat disajikan.**

Sasaran 13 Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan

Tabel 3.3.13

Analisa Capaian Sasaran 13
Meningkatnya kesejahteraan nelayan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai tukar nelayan	poin	N/A	-	-	95,00	-	0%	Data belum dapat disajikan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dapat dilihat dari indicator sasaran Nilai Tukar Nelayan tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 95,00 dan realisasi 0**,** capaian kinerja tahun

2025 0% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 0% dengan interprestasi **Data belum dapat di sajikan.**

Sasaran 14 Meningkatnya Partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal

Tabel 3.3.14

Analisa Capaian Sasaran 14
Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	%	N/A	-	-	20,00	4,00	20%	Kurang

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Partisipasi Penyandanga Disabilitas dalam Pekerjaan Formal dapat dilihat dari indikator sasaran Persentase penyanang disabilitas bekerja disektor formal tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 20,00 dan realisasi 4,00**,** capaian kinerja tahun 2025 20% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 20% dengan interprestasi **Kurang.**

Sasaran 15 Meningkatnya Kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)

Tabel 3.3.15

Analisa Capaian Sasaran 15
Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	N/A	-	-	10,00	20,00	200%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja Rentas dapat dilihat dari indikator sasaran Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan KabupatenTapanuli Tengah tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 10,00 dan realisasi 20,00 capaian kinerja

tahun 2025 200% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 200% dengan interprestasi **Sangat Baik.**

6. Tujuan keenam, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Bedaya Saing

Tujuan keenam, yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 16 Meningkatnya Daya Saing Industri

Tabel 3.3.16

Analisa Capaian Sasaran 16
Meningkatnya daya saing industri

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	%	11,26	5,41	48,05%	11,61-11,80	11,00	93.22%	Baik

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Industri dapat dilihat dari indikator sasaran Kontribusi sector industri terhadap PDRB tahun 2024 memiliki target 11,26 dan realisasi 5,41, capaian kinerja tahun 2024 48,05% dan pada tahun 2025 memiliki target 11,61-11,80 dan realisasi 11,00 capaian kinerja tahun 2025 93,22% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 92,22% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 17 Meningkatnya Nilai Tambah terhadap Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.3.17

Analisa Capaian Sasaran 17
Meningkatnya nilai tambah terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan-minum	%	1,33	6,90	518,77 %	1,32-1,39	1,33	95,68%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Tambah terhadapa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat dari indikator sasaran Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan-minum tahun 2024 memiliki target 1,33 dan realisasi 6,90 capaian kinerja tahun 2024 518,77% dan pada tahun 2025 memiliki target 1,32-1,39 dan realisasi 1,33

capaian kinerja tahun 2025 95,68% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 94,68% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 18 Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian

Tabel 3.3.18

Analisa Capaian Sasaran 18
Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Proporsi jumlah UMK non pertanian	%	62,00	47,02	75,84%	70,00	76,00	108,57%	Sangat Baik
2.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,072	-	0%	0,073	0,27	369,86%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian dapat dilihat dari indikator sasaran Proporsi jumlah UMK non pertanian tahun 2024 memiliki target 62,00 dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 70,00 dan realisasi 76,00 capaian kinerja tahun 2025 108,57% selanjutnya Indikator Sasaran Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2024 memiliki target 0,072 dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 0,073 dan realisasi 0,27 capaian kinerja 369,86%, maka pencapaian kinerja pada 2 sasaran ini adalah sebesar 293,5% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 19 Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif

Tabel 3.3.19

Analisa Capaian Sasaran 19
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase peningkatan investasi	%	N/A	-	-	10,50	19,68	187,43%	Data belum dapat disajikan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif dapat dilihat dari indikator sasaran Persentase peningkatan investasi tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0, capaian

kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 10,50 dan realisasi 19**,**68 capaian kinerja tahun 2025 187,43% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 187,43% dengan interprestasi **Sangat Baik.**

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meliputi penyusunan kebijakan, regulasi, insentiffiskal/non-fiskal, penyederhanaan perizinan, serta jaminan kepastian hukum dan keamanan bagi investor. Pemerintah juga bertugas membangun infrastruktur pendukung, mempromosikan peluang investasi domestik dan asing, serta mengawasi kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Sasaran 20 Meningkatnya Nilai Tambah perdagangan

Tabel 3.3.20
Analisa Capaian Sasaran 20
Meningkatnya nilai tambah pedagangan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,42	12,55	101,05%	12,79	12,32	96,32%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Perdaganga dapat dilihat dari indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2024 memiliki target 12,42 dan realisasi 12,55, capaian kinerja tahun 2024 101,05% dan pada tahun 2025 memiliki target 12,79 dan realisasi 12,32 capaian kinerja tahun 2025 96,32% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 95,32% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 21 Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat

Tabel 3.3.21

Analisa Capaian Sasaran 21
Meningkatnya literasi digital masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks masyarakat digital	Poin	40,34	40,31	99,93%	41,25	39,92	96,78%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Literasi Digital Masyarakat dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks masyarakat digital tahun 2024 memiliki target 40,34 dan realisasi 40,31, capaian kinerja tahun 2024 99,93% dan pada tahun 2025 memiliki target 41,25 dan realisasi 39,92**,** capaian kinerja tahun 2025 96,78%, maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 95,78% dengan interprestasi **Baik.**

Indeks Masyarakat Digital merupakan indeks yang mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks Masyarakat Digital KabupatenTapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar 40,31 poinmeningkat pada tahun 2023 menjadi 43,45 poin, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 40,34 poin.

Berdasarkan hasi levaluasi, Pilar pemberdayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 18,89 poin pada tahun 2022 menjadi 27,45 poin pada tahun 2024 dan merupakan pilar dengan capaian tertinggi, sementara pilar lainnya mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, sub-pilar pertama, yaitu Akses dan AdopsiTeknologi meningkat dari 48,78 poin pada tahun 2022 menjadi 63,95 poin pada tahun 2024, di mana hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat dan bisnis yang mengakses dan mengadopsi teknologi. Sub-pilar kedua, yaitu Ekosistem Pembelajaran cenderung menurun dari 42,76 poin pada tahun 2022 menjadi 39,29 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya tingkat adopsi teknologi pada sekolah. Menurunnya capaian ini disebabkan oleh kurang terawatnya sarana dan prasarana teknologi di sekolah. Sub-pilar ketiga, yaitu Digitalisasi Pemerintah, di mana sub-pilar ini baru dimasukkan kedalam formula pada tahun 2023. Capaian Digitalisasi Pemerintah menurun dari 70,30 poin pada tahun 2023 menjadi 40,31 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi di lingkungan pemerintah semakin buruk, di mana hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan dan pengembangan terhadap sistem pada aplikasi pemerintah.

Pada Pilar Keterampilan Digital, sub-pilar pertama, yaitu Komplementaritas memiliki capaian sebesar 58,16 poin pada tahun 2022 menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 51,25 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menggunakan beragam perangkat digital dan merespon informasi secara kritis semakin menurun. Pada sub-pilar kedua, yaitu Pengenalan menurun dari 91,07 poin pada tahun 2022 menjadi 50,42 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menggunakan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kemampuan dalam mengartikulasi kebutuhan informasi dan mencari data atau konten digital semakin menurun. Pada sub-pilar ketiga, yaitu Keamanan TIK menurun dari 62,72 poin pada tahun 2022 menjadi 52,46 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat dalam memahami risiko dan bahaya digital, serta proteksi terhadap data pribadi dan konten digital semakin menurun.

Pada Pilar Pemberdayaan, Sub-Pilar Konsumen/Pengguna meningkat dari 18,21 poin pada tahun 2022 menjadi 32,51 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi oleh masyarakat, seperti layanan keuangan digital, e-commerce, marketplace, dan layanan digital lainnya semakin meningkat, sementara pada Sub-Pilar Penjual/Penyedia meningkat dari 19,56 poin pada tahun 2022 menjadi 22,39 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pada Pilar Pekerjaan, Sub-Pilar pertama, yaitu Permintaan meningkat dari 47,31 poin pada tahun 2022 menjadi 56,66 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya permintaan perusahaan atau bisnis terhadap tenaga kerja yang memiliki kete rampilan digital. Sub-Pilar kedua, yaitu Penawaran juga meningkat dari 7,06 poin pada tahun 2022 menjadi 12,48 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan digital semakin meningkat. Namun, masih belum memenuhi permintaan pasar terhadap tenaga kerja dengan keterampilan digital.

7. Tujuan ketujuh, Meningkatkan Kemandirian Daerah

Tujuan ketujuh, yaitu Meningkanya kemandirian Daerah, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 22 Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.3.22

Analisa Capaian Sasaran 22
Meningkatnya sumber pendapatana asli daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,18	0,17	94,44	0,38-0,48	0,30	78,95%	Cukup

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari indikator sasaran Rasio pajak daerah terhadap PDRB 2024 memiliki target 0,18 dan realisasi 0,17 capaian kinerja tahun 2024 94,44% dan pada tahun 2025 memiliki target 0,38-0,48 dan realisasi 0,30**,** capaian kinerja tahun 2025 78,95% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 77,95% dengan interprestasi **Baik.**

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menggambarkan berapa besar kontribusi dari pajak yang diterima oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB masih sangat rendah di mana pada tahun 2024 menurun menjadi 0,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih belum mampu mendorong perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran 23 Meningkatnya Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah

Tabel 3.3.23

Analisa Capaian Sasaran 23
Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio BUMD	%	N/A	-	-	6,25	10,70	171,20%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Kontribusi BUMD terhadap Pendapatah Daerah dapat dilihat dari indikator sasaran Rasio BUMD tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 6,25 dan realisasi 10,70**,** capaian kinerja tahun 2025 171,20% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 171,20% dengan interprestasi **Sangat Baik.**

Sasaran 24 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Tabel 3.3.24

Analisa Capaian Sasaran 24
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Opini BPK atas laporan keuangan	%	WTP	WDP	50%	WTP	WTP	100%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabek dapat dilihat dari indikator sasaran Opini BPK atas laporan keuangan tahun 2024 memiliki target WTP dan realisasi WDP capaian kinerja tahun 2024 50% dan pada tahun 2025 memiliki target WTP dan realisasi WTP**,** capaian kinerja tahun 2025 100% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 75% dengan interprestasi **Baik.**

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus berupaya mengoptimalkan system Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat tersusun dengan baik dan benar. Berbagai upaya dilakukanya itu dengan memberikan Bimbingan tentang tata cara penyusunan laporan keuangan daerah berbasis aktual bagi para ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah, pendampingan penyusunan laporan keuangan OPD dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan OPD.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh opini WTP atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kecukupan dalam penyajian data sesuai dengan ketentuan dan menindak lanjut isetiap temuan pemeriksaan intern dan terinci oleh pemeriksa dari tahun ketahun sampai dengan akhir periode perencanaan strategis.

Untuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah kearah yang lebih baik, transparan dan akuntabel ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperhatikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun mendatang, adalah:

1. Perbaikan, penyempurnaan system/kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat;
2. Meningkatkan pelaksanaan asset daerah;
3. Meningkatkan system pengendalian intern pemerintah yang memadai dan diaplikasikan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keungan dan asset daerah;

8. Tujuan kedelapan, Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Tujuan kedelapan, yaitu Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 25 Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Tabel 3.3.25

Analisa Capaian Sasaran 25
Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks pelayanan publik	Poin	3,47	2,51	72,33%	3,55	2,30	64,79%	Cukup
2.	Indeks kepuasan masyarakat	Poin	84,36	95,11	112,74%	85,46	93,33	109,21%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terciptanya Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks pelayanan publik tahun 2024 memiliki target 3,47 dan realisasi 2,51 capaian kinerja tahun 2024 72,33% dan pada tahun 2025 memiliki target 3,55 dan realisasi 2,30**,** capaian kinerja tahun 2025 64,79%,selanjutnya Indeks kepuasan masyarakattahun 2024 memilki target 84,36 dan realisasi95,11 capaian kinerja 112,74% dan pada tahun 2025 memiliki target 85,46 dan realisasi 93,33 capaian kinerja 109,21% maka pencapaian kinerja pada 2 sasaran ini adalah sebesar 172,00% dengan interprestasi **Sangat Baik.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, dinyatakan bahwa survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pada 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan public menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudahditentukan. Atributkepuasan SKM denganmenggunakan 9 (sembilan) unsur layanan, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk, kompetensi, perilaku, maklumat, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Sasaran 26 Meningkatnya Profesionalitas ASN

Tabel 3.3.26

Analisa Capaian Sasaran 26
Meningkatnya profesionalitas ASN

No	IndikatorSasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks profesionalitas ASN	Poin	62,23	75,28	120,97 %	64,30	62,145	96,65%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalitas ASN dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks profesionalitas ASN tahun 2024 memiliki target 62,23 dan realisasi 75,28 capaian kinerja tahun 2024 120,97% dan pada tahun 2025 memiliki target 64,30 dan realisasi 62,145 capaian kinerja tahun 2025 96,65% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 95,65% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 27 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, Demokrasi dan HAM

Tabel 3.3.27

Analisa Capaian Sasaran 27
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, Demokrasi dan HAM

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks demokrasi indonesia	Poin	N/A	-	-	70,00	-	0%	Data belum dapat disajikan
2.	Indeks harmoni indonesia	Poin	N/A	-	-	6,30	-	0%	Data belum dapat disajikan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, Demokrasi, dan HAM dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks demokrasi Indonesia tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 70,00 dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2025 0%, selanjutnya Indeks harmoni Indonesia tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0 capaian kinerja 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 6,30 dan realisasi 0 capaian kinerja 0%, maka pencapaian kinerja pada 2 sasaran ini adalah sebesar 0% dengan interprestasi **Data belum dapat disajikan.**

9. Tujuan kesembilan, Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Harmonis

Tujuan kesembilan, yaituTerwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 28 Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

Tabel 3.3.28

Analisa Capaian Sasaran 28
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks pembangunan keluarga	Poin	N/A	-	-	48,88-57,64	57,50	99,76%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dapat dilihat dari indicator sasaran Indeks pembangunan keluarga tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 48,88-57,64 dan realisasi 57,50 capaian kinerja tahun 2025 99,76% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 99,76% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 29 TerwujudnyaBerkebudayaan Maju

Tabel 3.3.29

Analisa Capaian Sasaran 29
Terwujudnya Berkebudayaan Maju

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100,00	100,00	100%	100,00	100,00	100%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terwujudnya Bekebudayaan Maju dapat dilihat dari indikator sasaran Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan tahun 2024 memiliki target 100,00 dan realisasi 100,00 capaian kinerja tahun 2024 100% dan pada tahun 2025 memiliki target 100,00 dan realisasi 100,00 capaian kinerja tahun 2025 100% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 100% dengan interprestasi **Baik.**

Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan mencakup berbagai aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya bangsa. Pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, mempromosikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun takberwujud (intangible). Urusan ini mencakup pelestarian situs bersejarah, museum, Bahasa daerah, seni tradisional, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur budaya.

Sasaran 30 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Tabel 3.3.30

Analisa Capaian Sasaran 30
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	97,00	100,00	103,09 %	100,00	100,00	100%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya dapat dilihat dari indikator sasaran Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan tahun 2024 memilikitarget 97,00 dan realisasi100,00 capaian kinerja tahun 2024 103,09% dan pada tahun2025 memiliki target 100,00 dan realisasi 100,00 capaian kinerja tahun 2025 100% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 99% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 31 Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak

Tabel 3.3.30

Analisa Capaian Sasaran 30
Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlindungan Anak

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks ketimpangan gender	Poin	0,438	0,40	91,32%	0,425-0,395	0,410	96,47%	Baik
2.	Indeks perlindungan anak	Poin	55,15	63,00	114,23%	55,80	65,00	116,49%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Gender dan Perlidungan Anak dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks ketimpangan gender tahun 2024 memiliki target 0,438 dan realisasi0,40, capaian kinerja tahun 2024 91,32% dan pada tahun2025 memiliki target 0,425-0,395 dan realisasi 0,410 capaian kinerja tahun 2025 96,47%, selanjutnya Indeks perlindungan anak tahun 2024 memiliki target 55,15 dan realisasi 63,00 capaian kinerja tahun 2025 116,49%, maka pencapaian kinerja pada 2 sasaran ini adalah sebesar 211,96% dengan interprestasi **Sangat Baik.**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: 1) Kesehatan reproduksi; 2) Pemberdayaan gender; 3) Pasar tenaga kerja. IKG dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan berbasis gender dan memberikan gambaran tentang capaian program-program pengarusutamaan gender.

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum ketimpangan gender di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengupay akan program-program pengarusutamaan gender, seperti peningkatan akses dan layanan Kesehatan terhadap penduduk perempuan, pemberdayaan penduduk perempuan, dan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan.

Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran penting yang menggambarkan sejauh mana sebuah daerah atau negara mampu menyediakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangkan secara optimal. Indeks ini mencakup berbagai aspek perlindungan, mulai dari pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Tingginya indeks perlindungan anak menandakan keberhasilan kebijakan dan program yang mampu memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi yang aman dan mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang.

Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum dan regulasi terkait perlindungan hak-hak anak semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus lebih perhatian terhadap kondisi ini. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu Menyusun regulasi dan kebijakan yang kuat terkait perlindungan hak-hak anak di daerahnya.

10. Tujuan kesepuluh, Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Tujuan kesepuluh, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 32 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur berkualitas

Tabel 3.3.32

Analisa Capaian Sasaran 32
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur berkualitas

No	IndikatorSasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Poin	N/A	-	-	50,00	66,42	132,84%	Sangat Baik
2.	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	N/A	-	-	10,00	42,81	428,1%	Sangat Baik
3.	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman	%	N/A	-	-	0,50	61,13	122,26%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun2025 memiliki target 50,00dan realisasi 66,42 capaian kinerja tahun 2025 132,84%, selanjutnya Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 20240% dan tahun 2025 memiliki target 10,00 dan realisasi 42,81 capaian kinerja 428,1%, selanjutnya Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman tahun 2024 memilki target 0 dan realisasi 0 capaian kinerja 0% dan tahun 2025 memilki target 0,50 dan realisasi 61,13 capaian kinerja 122,26%, maka pencapaian kinerja pada 3 sasaran ini adalah sebesar 227,73% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 33 Terwujudnya Layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau

Tabel 3.3.33

Analisa Capaian Sasaran 33
Terwujudnya LayananTransportasi yang nyaman, aman dan terjangkau

No	IndikatorSasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio konektivitas	%	N/A	-	-	83,33	83,33	100%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terwujudnya Layanan Transportasi yang nyaman, aman, dan Terjangkau dapat dilihat dari indikator sasaran Rasio konektivitas tahun 2024 memilikitarget N/A dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun2025 memiliki target 83,33 dan realisasi 83,33 capaian kinerja tahun 2025 100% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 100% dengan interprestasi **Baik.**

Urusan Perhubungan adalah urusan pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi dan perhubungan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menyelenggarakan pelayanan, menjamin keselamatan dan keamanan transportasi, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas sarana prasarana transportasi, melaksanakan pembinaan teknis, serta mengembangkan system transportasi yang efektif dan efisien untuk mendukung mobilitas penduduk, memperlancar arus barang dan jasa, sertameningkatkan pelayanan transportasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Sasaran 34 Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan

Tabel 3.3.34

Analisa Capaian Sasaran 34
Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan

No	IndikatorSasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	%	83,53	83,53	100%	86,04	83,56	97,12%	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terpenuhinya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelnjutan dapat dilihat dari indikator sasaran Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan tahun 2024 memiliki target 83,53 dan realisasi 83,53 capaian kinerja tahun 2024 100% dan pada tahun 2025 memiliki target 86,04 dan realisasi 83,56 capaian kinerja tahun 2025 97,12% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 96,12% dengan interprestasi **Baik.**

Akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi salah satu factor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman serta nyaman. Hunian layak tidak hanya meliputi aspek fisik seperti struktur bangunan yang kokoh dan fasilitas dasar yang memadai, tetapi juga harus dapat dijangkau secara finansial oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan rumah yang terjangkau penting agar tidak terjadi ketimpangan dan eksklusi sosial, terutama di wilayah perkotaan yang sering menghadapi tekanan harga properti yang tinggi. Selain keterjangkauan, prinsip keberlanjutan dalam hunian harus diperhatikan dengan menerapkan konsep ramah lingkungan dan hemat energi guna mengurangi dampak negate fterhadap lingkungan.

Hal ini menandakan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni sudah baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan anggaran untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sasaran 35 Meningkatnya Infrastruktur yang resilien terhadap bencana

Tabel 3.3.35

Analisa Capaian Sasaran 35
Meningkatnya Infrastruktur yang resilien terhadap bencana

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks resiko bencana	Poin	181,49	181,49	100%	172,42	230,42	133.63%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur yang Resilien terhadap Bencana dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks resiko bencana tahun 2024 memiliki target 181,49 dan realisasi 181,49 capaian kinerja tahun 2024 100% dan pada tahun 2025 memiliki target 172,42 dan realisasi 230,42 capaian kinerja tahun 2025 133,63% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 132,63% dengan interprestasi **Sangat Baik.**

Wilayah rawan bencana adalah daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap kejadian bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan badai. Kondisi geografis, iklim, serta aktivitas manusia yang tidak terkontrol seringkali menjadi factor penyebab kerawanan tersebut. Daerah-daerah ini sering mengalami kerugian material dan korban jiwa yang signifikan akibat bencana yang terjadi. Untuk memahami dan mengelola risiko di wilayah-wilayah ini, digunakanlah Indeks Risiko Bencana (IRB).

Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko setiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada, termasuk risiko bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Terlihat dari data indeks risiko bencana bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada status risiko bencana Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020-2023 memiliki indeks risiko bencana di atas 200 poin dan pada tahun 2024 menurun menjadi 181,49 dengan status risiko bencana yang sama.

11. Tujuan kesebelas, Terwujudnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup

Tujuan kesebelas, yaitu Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 36 Terjaganya kelestarian lingkungan hidup

Tabel 3.3.36
Analisa Capaian Sasaran 36
Terjaganya kelestarian lingkungan hidup

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Porsi EBT dalam bauran energi	%	N/A	-	-	20,00	-	-	Data belum dapat disajikan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator sasaran Porsi EBT dalam bauran energi tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 20,00 dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2025 154% maka pencapaian kinerja pada 3 sasaran ini adalah sebesar 154% dengan interprestasi **sangat Baik.**

Sasaran 37 Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Tabel 3.3.37
Analisa Capaian Sasaran 37
Meningkatnya Pengelolaan Sampah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Timbunan Sanpah	Ton	N/A	-	-	66.000,00	50.000,00	75,76	Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari indikator sasaranTimbunan sampah tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0, capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 66.000,00 dan realisasi 50.000,00 capaian kinerja tahun 2025 75,76% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 75,76% dengan interprestasi **Baik.**

Sasaran 38 Menurunnya Emisi Gas Rumah Tangga

Tabel 3.3.38
Analisa Capaian Sasaran 38
Menurunnya Emisi Gas Rumah Tangga

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penurunanemisi GRK (ton CO2eg)	Ton	N/A	-	-	142,488,58	156,73	109,99	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Menurunnya Emisi Gas Rumah Tangga dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks resiko bencana tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 142,488,58 dan realisasi 156,73 capaian kinerja tahun 2025 109,99% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 109,99% dengan interprestasi **Sangat Baik.**

12. Tujuan keduabelas, Terwujudnya Pembangunan Desa yang Merata

Tujuan kedua belas, yaitu Terwujudnya pembangunan desa yang merata, memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran 39 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

Tabel 3.3.39

Analisa Capaian Sasaran 39
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase desa mandiri	%	N/A	-	-	1,26	1,88	149,21%	Sangat Baik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa dapat dilihat dari indikator sasaran Persentase desa mandiri tahun 2024 memiliki target 0 dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 1,26 dan realisasi 1,88 capaian kinerja tahun 2025 149,21% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 149,21 % dengan interprestasi **Sangat Baik.**

Sasaran 40 MeningkatnyaKualitasPerencanaan Pembangunan Desa

Tabel 3.3.40

Analisa Capaian Sasaran 40
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024	Tahun 2025		Capaian kinerja tahun 2025	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Poin	N/A	-	-	70,00	-	-	Data dalam proses penilaian

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa dapat dilihat dari indikator sasaran Indeks perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 memiliki target N/A dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2024 0% dan pada tahun 2025 memiliki target 70,00 dan realisasi 0 capaian kinerja tahun 2025 0% maka pencapaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 0% dengan interprestas **Data dalam proses penialaian.**

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab daerah mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 2025 – 2029 serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik melalui perangkat daerah maupun DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kebijakan Umum Pembangunan KabupatenTapanuli Tengah tahun 2025 yang disepakati telah dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2025 serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2025.(Realisasi Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini)

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Belanja		(%)
		Anggaran	Realisasi	
1.	Dinas Pendidikan	389.537.616.351,00	362.515.681.632,00	93,06
2.	Dinas Kesehatan	180.036.037.415,00	157.959.764.257,23	87,74
3.	RSUD Pandan	81.300.012.122,00	82.486.185.018,00	101,46
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.959.611.955,00	35.430.579.260,00	73,88
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.085.872.633,00	5.625.348.913,00	92,43
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	16.273.228.511,00	14.899.765.373,00	91,56
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.362.757.831,00	4.654.322.803,00	86,79
8.	Dinas Sosial	4.016.464.150,40	3.646.153.031,00	90,78
9.	Dinas Ketenagakerjaan	3.842.005.287,00	3.517.871.250,00	91,56
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	3.326.880.119,00	3.045.006.014,00	91,53
11.	Dinas Ketahanan Pangan	3.481.664.159,00	2.506.747.226,00	72,00
12.	Dinas Lingkungan Hiup	13.035.059.050,00	11.073.665.910,00	84,95
13.	Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil	6.290.289.707,00	5.834.034.035,00	92,75
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.916.665.130,00	5.202.917.157,00	87,94
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.056.602.504,00	14.165.218.724,00	83,05
16.	Dinas Perhubungan	4.441.636.845,00	4.293.711.943,00	96,67
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.347.105.550,00	5.624.221.244,00	76,55
18.	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah	2.359.074.148,20	1.966.472.788,20	83,36
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpau Satu Pintu	3.512.713.160,00	3.163.453.144,00	90,06
20.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.296.931.900,00	2.111.857.153,00	91,94
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2.163.885.237,00	1.870.431.390,00	86,44

22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.295.300.277,00	4.001.663.333,00	93,16
23.	Dinas Pariwisata	2.901.966.045,00	2.525.574.033,00	93,16
24.	Dinas Pertanian	10.582.046.488,00	7.867.952.071,00	74,35
25.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.959.288.634,00	2.503.551.481,00	63,23
26.	Sekretariat Daerah	39.428.543.917,81	34.027.579.505,00	86,30
27.	Sekretariat DPRD	27.112.598.468,00	25.368.440.258,00	93,57
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.253.096.847,00	5.853.789.686,00	93,61
29.	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (SKPD)	261.613.859.633,29	203.495.685.150,00	77,78
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia	6.635.491.964,00	5.460.083.541,00	82,29
31.	INSPEKTORAT	7.980.846.684,00	7.159.681.418,00	89,71
32.	Kecamatan Pandan	14.151.203.555,00	12.566.085.566,00	88,80
33.	Kecamatan Sarudik	4.028.121.101,00	3.909.896.174,00	97,07
34.	Kecamatan Tukka	4.611.651.369,00	4.045.916.118,00	87,73
35.	Kecamatan Badiri	2.548.475.350,00	2.489.769.019,00	97,70
36.	Kecamatan Pinangsori	3.960.154.213,00	3.528.494.503,00	89,10
37.	Kecamatan Lumut	1.545.448.008,00	1.176.242.112,00	76,11
38.	Kecamatan Sibabangun	2.258.976.358,00	2.066.241.825,00	91,47
39.	Kecamatan Sukabangun	891.049.580,00	708.771.677,00	79,54
40.	Kecamatan Tapian Nauli	2.316.524.400,00	2.000.584.215,00	86,36
41.	Kecamatan Sitahuis	1.847.471.797,00	1.531.221.975,00	82,88
42.	Kecamatan Sorkam	2.853.318.305,00	2.737.175.456,00	95,93
43.	Kecamatan Sorkam Barat	1.804.015.982,30	1.746.456.241,00	96,81
44.	Kecamatan Kolang	2.517.391.359,00	1.974.713.127,00	78,44
45.	Kec. PasaribuTobing	829.932.450,00	787.065.413,00	94,83
46.	Kecamatan Barus	2.138.380.489,00	1.870.969.605,00	87,49
47.	Kecamatan Sosorgadong	1.587.128.159,00	1.306.690.387,00	82,33
48.	Kecamatan Barus Utara	810.428.916,00	754.504.025,00	93,10
49.	Kecamatan Andam Dewi	1.261.716.100,00	1.186.795.966,00	94,06
50.	Kecamatan Sirandorung	1.859.959.740,00	1.624.065.419,00	87,32
51.	Kecamatan Manduamas	2.435.549.493,00	1.844.615.499,00	75,74
52.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.642.061.200,00	3.091.164.338,00	84,87
Jumlah		1.236.304.110.647,00	1.082.804.847.401,63	87,58

Sumber Badan PKPAD

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah disusun sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis Kinerja Pemerintah KabupatenTapanuli Tengah. Penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Penilaian Kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun berkenaan wajib dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan :
   - Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
   - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
   - Rencana Strategi (Renstra)

2. Berpedoman pada pencapaian kinerja Tahun 2025 kiranya yang menjadi penekanan dan perhatian adalah tetap focus terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah 2025–2029 dan mengoptimalkan pemanfaatan kinerja periode berikutnya dan memastikan penetapan target indikator kinerja telah mempertimbangkan realisasi indicator kinerja yang sama pada Tahun sebelumnya.
3. Meningkatkan kualitas Dokumen perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai dari kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah KabupatenTapanuli Tengah Tahun 2025–2029 sampai ke Dokumen pelaksanaan Anggaran di masing – masing Perangkat daerah.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalambidang Akuntabilitas dan Manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang berkualitas dan Akuntabel.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini kami ucapkan terimakasih.

